

MENELISIK FALSAFAH *SULAPA EPPA* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Pada Kantor Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara)

Saras Wati¹, Rismawati², Jumawan Jasman³

^{1 2 3} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo
E-mail: saraswati1414@gmailcom¹, risma11@umpalopo.ac.id²

ABSTRACK

This study aims to determine the meaning of the Sulapa Eppa Philosophy in Village Fund Management (Study at the Mappedeceng Village Office, North Luwu Regency). The village office is a place where irregularities can occur because the village funds are quite large in number. For this reason, by including the meaning contained in the philosophy of sulapa eppa, of course, it can prevent actions that can harm society and the government. The type of research used is qualitative research with a phenomenological approach. Collecting data by means of interviews and with additional secondary data. The data analysis method is starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The last stage is the validity of the data where to test the validity of the data is by triangulation, and the source triangulation is used.

The results of this study found that village officials had applied the meaning of the sulapa eppa philosophy in managing village funds starting from the planning, implementation, reporting, and accountability cycles.

Key words : Philosophy of Sulapa Eppa, Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Salah satu dampak dari adanya otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Dalam hal ini daerah diberikan kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat dan membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Desa merupakan tingkat pemerintah paling bawah yang memerlukan kewenangan dalam mengelola sumber pendapatannya secara mandiri dan dengan bantuan keuangan dari pusat serta daerah. Sesuai amanat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan dana yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Adapun sumber keuangan desa meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kota/kabupaten dan hibah.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memajukan desa dan pemerataan pembangunan tidak semua berjalan baik seperti yang di harapkan, dikarenakan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Menurut Badan Pengawas Keuangan (BPK) permasalahan disebabkan karena minimnya pengetahuan aparatur desa dan tidak diikuti oleh pendampingan serta pengawasan yang maksimal dalam hal pengelolaan serta pelaporannya. Artinya, hal itu tentu saja bisa mengakibatkan terjadinya sebuah penyimpangan yang dapat dilakukan oleh aparatur desa.

Fenomena yang banyak terjadi saat ini yaitu banyaknya tuntutan dari masyarakat tentang tata kelola dalam pemerintahan terkhusus pada pengelolaan dana

desa yang kurang baik dan tidak berjalan dengan seharusnya (Hanum,2019). Pengelolaan dan pelaporan dana desa yang tidak dilakukan dengan sempurna terbukti dengan adanya beberapa kasus penyelewengan dana desa seperti pada kasus yang baru-baru ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19, dimana penggelapan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Desa Darul Aman, Riau (Indriani, 2020). Penggelapan uang juga terjadi di Desa Wonosido, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kepala desa senilai Rp. 292 juta (Saron, 2020). Berdasarkan kasus yang terjadi dalam pengelolaan dana desa selain kemampuan dan pengawasan yang tidak maksimal, kurangnya moralitas yang ditanamkan dalam diri individual para aparat desa juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus-kasus penyimpangan di kalangan pemerintahan desa. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya perlu dijadikan sebagai dasar dalam kegiatan pemerintahan terkhusus dalam pemerintahan desa. Budaya dianggap oleh masyarakat dapat memberikan nilai kebaikan dalam hidup (Suparno *et al.*, 2018).

Sulapa Appa mempunyai banyak sekali makna yang mencerminkan suatu pandangan tentang dunia. *Sulapa Eppa* (belah ketupat) ditafsirkan sebagai model dari kosmos yang dihubungkan dengan empat sarwa alam yaitu udara, air, api, dan tanah yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Adapun ke empat unsur tersebut merupakan sifat yang ada pada manusia. Konsep “tau” dalam bahasa Bugis-Makassar diartikan sebagai manusia, yang dalam kebudayaan sulawesi selatan dianjurkan untuk memiliki sipa tau (sifat manusia) yaitu sifat yang mengarah pada sistem nilai dan norma-norma. Masyarakat Bugis-Makassar memegang prinsip *Sulapa Appa* dalam mengembang tanggung jawab untuk merawat kearifan lokal dan keselarasan dalam tata

kelolanya sehingga tak jarang dari mereka yang meraih keberhasilan serta kesuksesan, namun tidak semua ada juga yang melebur dalam kehidupan yang memalukan (mappakasiri). Oleh karena itu kualitas utama dari manusia bugis yang terdapat dalam *Sulapa Eppa* merupakan modalitas yang harus dimiliki setiap individu dan pemimpin yang baik (Solata, 2015). Adapun keempat modalitas yang dimaksud yaitu *Macca* yang berarti cakep, cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. *Macca* juga dapat diartikan sebagai *pannawa-nawa* yang mengandung arti seperti cinta kebenaran, selalu berhati-hati, dan bersifat tulus. Dengan demikian, *Macca* juga dapat diartikan sebagai seseorang yang menyukai hal-hal yang baik dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan tidak mementingkan diri sendiri. *Malempu* atau jujur dapat diartikan bagaimana seseorang dapat mempertahankan hak-hak mereka sesama manusia dan kewajiban terhadap penciptanya (Jannah, 2020). *Warani* atau berani yang artinya pemimpin harus memiliki sikap yang berani, memiliki komitmen dan siap mengambil risiko, tidak penakut apalagi pengecut. *Getteng* atau tangguh yang diartikan sebagai seseorang yang konsisten. Konsisten merupakan sifat yang menunjukkan ketetapan terhadap sesuatu atau keadaan yang tidak berubah. Sikap ini menunjukkan bahwa individu dengan nilai keteguhan tidak mudah berubah dalam hal pendirian atau keyakinan (Rahmi *et al.*, 2017). Dalam hal ini jelas bahwa falsafah tersebut selain menjadi wasiat kebudayaan, juga menjadi sebuah sistem nilai dalam pedoman hidup masyarakat Sulawesi Selatan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizcha Ega Permata dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari (2020) yang berjudul kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa menemukan bahwa pengelolaan dana desa di desa Larep sudah dilakukan sesuai dengan semestinya di tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggung jawaban secara umum tidak ditemukan adanya potensi korupsi dikarenakan adanya nilai-nilai budaya/tradisi yang menjadi kearifan lokal yang kuat yang dijiwai oleh warga Desa Lerep. Penelitian lain yang dilakukan oleh Widiananda dan Aprima (2021) yang berjudul peran kearifan lokal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menemukan bahwa kearifan lokal di desa Kasego memiliki nilai-nilai luhur dan positif yang jika dijiwai dan diimplementasikan di setiap tahapan pengelolaan keuangan desa maka akan mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Kasego. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Muh. Nur Sucipto Rahman (2021) yang berjudul pengawasan anggaran ditinjau dari budaya lokal Makassar dalam konsep *good governance* menemukan bahwa nilai budaya siri' na pace dapat meningkatkan pengawasan anggaran alokasi dana desa (ADD) karena sebagaimana pengelolaan ADD berkaitan dengan kejujuran dan memiliki nilai budaya juga memiliki nilai lempu' (kejujuran) dan ada' tongeng (berkata benar) dalam mempertanggung jawabkan suatu perbuatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode keahliatan, yaitu mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Sahlan, 2012). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Atmadja, 2013).

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi yang berupaya mengungkap makna atau fenomena, sebagai upaya untuk mencapai pemahaman akan suatu makna dan konsep serta bagaimana mengenali kesadaran melalui beberapa tahapan. fenomenologi merupakan salah satu pendekatan paradigma interpretif yang tepat digunakan (Marantika, 2017). Mengingat tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji makna falsafah *sulapa eppa* dalam pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa yang diberikan kepada setiap desa terbilang cukup besar jumlahnya, belum lagi pendapatan asli desa sehingga dalam pengelolaannya harus hati-hati dan patut mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, pada saat ini aturan dari pemerintah hanya sebagai angin lalu bagi mereka yang tidak mematuhi, melihat sekarang ini banyak terjadi tindakan-tindakan yang menyalahi aturan dalam melakukan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya nilai-nilai dari Falsafah *Sulapa Eppa* untuk bisa mengontrol perilaku para aparat desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Lukman selaku kepala desa yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa sangat penting iman yang kuat agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan, dan selain iman yang kuat aturan dari pemerintah yang dipatuhi juga menjadi landasannya serta dengan memasukkan nilai budaya dalam setiap kegiatan sehari-hari agar dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukan. Dengan memakai Falsafah *Sulapa Eppa* yang merupakan suatu budaya yang banyak sekali mengandung makna nilai tentu dapat mencegah suatu tindakan yang menyimpang terkhusus dalam pengelolaan dana desa. Adapun suatu bentuk pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh para aparat desa sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Desa Mappedeceng, mengatakan bahwa dana atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah

sudah dikelola dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada. Dimana sebelum melakukan penyaluran dananya terlebih dahulu mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk membahas mengenai apa yang akan dilakukan agar aparat desa tidak serta merta melakukan perubahan tanpa sepengetahuan masyarakat. setelah melakukan musyawarah, aparat desa bisa mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan permintaan dari masyarakat sehingga pengelolaan berjalan dengan semestinya berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pengelolaan dana desa yang dikelola berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan oleh pemerintah menunjukkan bahwa para aparat desa sudah menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat dengan baik dan bertanggungjawab. Selain itu, menjadikan falsafah *sulapa eppa* sebagai landasan atau pedoman utama dalam menjalankan setiap kegiatan terlebih pada tugas yang diberikan agar menjadi lebih baik dan terhindar dari kesalahan. Untuk terwujudnya pemerintahan yang baik seorang pemimpin dituntut untuk bisa memiliki empat kualitas yang ada pada dirinya yang tidak terpisahkan dengan yang lainnya yaitu *Macca*, *Lempuq*, *Warani*, dan *Getteng*. Ke empat kualitas itu terdapat dalam falsafah *sulapa eppa*. Bila dirangkai akan menjadi:

“*Macca na Malempuq, Warani na Magetteng*” (pandai dan jujur, berani dan teguh bertindak).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa setiap pemimpin haruslah memiliki empat kualitas seperti yang terdapat dalam falsafah *sulapa eppa*. Adapun keempat kualitas tersebut harus saling berhubungan satu sama lain dan tidak boleh terpisahkan. Kecerdasan saja tidak cukup harus disertai dengan kejujuran, karena saat ini banyak orang yang cerdas tapi tidak jujur yang mana menggunakan kecerdasannya untuk berbuat curang dan membodohi orang lain. Oleh sebab itu, kecerdasan dan kejujuran harus

saling terikat satu sama lain. Selanjutnya, keberanian juga tidaklah cukup, keberanian harus disertai dengan keteguhan atau ketegasan dalam bertindak yang dimana ketegasan harus selalu dipegang erat agar setiap keputusan yang diambil apapun itu tidak mudah goyah oleh pengaruh dari orang lain. Orang yang cerdas dan jujur tetapi tidak berani dan tegas dalam bertindak tidak akan bisa menjalankan tugas dengan baik. Hasil Wawancara dengan Pak Lukman selaku Kepala Desa Mappedeceng, mengatakan bahwa *falsafah sulapa eppa* yang mengandung makna nilai secara tidak langsung mereka sudah tanamkan dan diaplikasikan dalam setiap pekerjaan. Akan tetapi, ketika mereka melakukan pengelolaan yang sudah sesuai dengan aturan yang ada tidak dapat disimpulkan bahwa mereka mengaplikasikan *falsafah sulapa eppa* didalamnya. Namun, kita dapat melihat dari cara mereka berinteraksi terhadap sesama serta cara kerja dilapangan. Selanjutnya wawancara terhadap salah satu budayawan yang bernama Pak Murdaing mengenai “*falsafah sulapa eppa*” mengungkapkan *sulapa eppa* sangat perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kerana banyaknya nilai yang bisa diambil untuk dijadikan sebagai penjagaan agar dapat terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Apalagi jika berhubungan dengan amanah dan tanggungjawab yang diberikan tentulah harus mengutamakan nilai dari *falsafah sulapa eppa* kerana berkaitan dengan orang lain. Menanamkan dan mengaplikasikan *falsafah sulapa eppa* dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud yaitu tidak adanya para aparat desa yang melakukan penyimpangan untuk kepentingan sendiri maupun kelompok, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik dan maju.

Budaya atau kearifan lokal adalah suatu hal yang diyakini dan menjadi tradisi disuatu daerah masing-masing. Budaya banyak diyakini oleh masyarakat karena banyak mengandung makna nilai baik itu dari segi perilaku, cara pandang, dan larangan-larangan yang berkaitan dalam kehidupan. Budaya atau kearifan lokal diwariskan oleh orang tua terdahulu dan diajarkan kepada para generasinya, meskipun pada zaman sekarang budaya atau kearifan lokal bukan lagi sesuatu yang dianggap penting oleh sebagian orang karena perkembangan zaman yang semakin hari membuat cara pandang seseorang berubah dan menganggap budaya atau kearifan lokal tidak lagi penting.

Falsafah *Sulapa Eppa* adalah suatu kearifan lokal yang diyakini masyarakat Bugis-Makassar dapat memberikan nilai kebaikan dalam hidup mereka. Masyarakat Bugis-Makassar memegang prinsip *sulapa eppa* dalam setiap perilaku dan tindakannya. Namun, tidak jarang sebagian dari mereka terjerumus dalam kehancuran karena tidak mampu mengamalkan makna nilai yang ada pada falsafah *sulapa eppa*. dalam hal ini, falsafah *sulapa eppa* sangat penting bila diterapkan dalam setiap bidang instansi terkhusus pada instansi pemerintahan yaitu kantor desa yang diberikan wewenang dan hak untuk mengelola dana desa yang diberikan. Karena dalam falsafah *sulapa eppa* ada nilai yang sangat cocok bilah diterapkan oleh para aparat desa yaitu nilai *Macca*, *Malempuq*, *Warani*, *na Magetteng*.

1. *Macca* (kecerdasan)

Macca diartikan sebagai cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Sifat *macca* mencakup kemampuan seseorang dalam memahami segala sesuatu yang bila dibawa ke dunia pekerjaan akan memberikan kemudahan. Pengelolaan dana desa sangat penting adanya nilai *macca* yang diterapkan

oleh para aparat karena dalam mengelola dana desa selain kemampuan kecerdasan juga adalah hal yang sangat dibutuhkan. Dengan adanya kecerdasan yang dimiliki bisa memberikan ide-ide atau gagasan mengenai program atau kegiatan apa yang akan dilakukan didalam desa sehingga membuat masyarakat lebih sejahtera dan pembangunan desa lebih maju. Beberapa contoh yang membuktikan bahwa nilai *macca* yang ada dalam falsafah *sulapa eppa* sudah mereka terapkan dalam pengelolaan dana desa yaitu Pembuatan jaringan irigasi untuk penanganan persoalan air di sawah para masyarakat desa mappedeceng. Dalam hal ini aparat desa melihat banyak sawah warga desa yang sering terendam air apabila musim hujan yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman padi. Serta pembuatan jalan tani bagi masyarakat desa yang memiliki perkebunan di atas gunung untuk mempermudah mereka dalam akses jalan. Sebelum adanya jalan tani banyak warga yang kesulitan dalam membawa hasil panen mereka karena kondisi jalan yang kurang baik.

2. *Malempuq* (kejujuran)

Malempuq diartikan sebagai sifat jujur yang dimiliki seseorang baik itu dari segi tindakan dan perkataan. Nilai kejujuran sangat penting diterapkan dalam setiap diri individu apa lagi bagi mereka yang diberikan tugas dan tanggungjawab. Dalam pengelolaan dana desa kejujuran adalah sesuatu yang begitu sakral dan harus ada pada setiap diri para aparat desa karena mereka mengelola dana yang cukup besar jumlahnya dimana dana tersebut

diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di desa. Salah satu contoh yang membuktikan bahwa nilai *maleppuq* sudah mereka terapkan dalam pengelolaan dana yaitu dengan menyediakan papan informasi mengenai jumlah anggaran desa yang masuk dan diolah untuk kebutuhan apa saja, dipajang di depan kantor desa agar masyarakat setempat bisa melihat. Adapun alasan para aparat desa menyediakan papan informasi tersebut yaitu untuk menghindari adanya prasangka buruk dari masyarakat desa setempat mengenai dana desa yang diberikan oleh pemerintah.

3. *Warani* (keberanian)

Warani diartikan sebagai sifat berani yang dimiliki oleh seseorang yang tidak takut menghadapi segala macam resiko yang dihadapi. Keberanian adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam melakukan segala sesuatu selama itu memberikan kebaikan. Keberanian dalam dunia kerja sangat penting untuk diterapkan karena dalam lingkungan pekerjaan pasti ada saja yang membuat kita harus berani menyampaikan pendapat dan memberikan masukan kepada orang lain. Dalam pengelolaan dana desa, setiap aparat harus berani menyampaikan segalanya tanpa ada yang ditutup-tutupi atau dikurang-kurangi apalagi bila berkaitan dengan anggaran.

4. *Magettang* (ketegasan)

Magettang diartikan sebagai sifat tegas dan konsisten, yaitu tidak lemah selalu berpegang teguh pada penderiannya, Hal ini dimaknai dengan sikap yang berani dan percaya diri, mengungkapkan apa yang benar dan apa yang

salah. Ketegasan sangat penting bila dimiliki oleh seorang pemimpin seperti aparat pemerintah terkhususnya para aparat desa yang diberikan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola dana desa. Dalam hal ini, peran kepala desa begitu besar sehingga dituntut untuk bisa memiliki ketegasan dalam pendirian dan keputusan yang diambil selama itu baik dan tidak merugikan masyarakat serta desanya.

Salah satu contoh kasus yang membuktikan bahwa nilai *warani* dan *magettang* sudah mereka terapkan yaitu dengan penyelesaian permasalahan batas tanah antara warga. Dalam hal ini kepala desa dan para aparat desa bertugas untuk mengembalikan Kembali penguasaan lahan kepada pemilik sebenarnya tanpa memihak siapapun. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa para aparat desa sudah menerapkan nilai *warani* dan *magettag*

Berdasarkan penjelasan keempat makna yang terdapat dalam falsafah *sulapa eppa* dapat dilihat bahwa peran falsafah *sulapa eppa* sangat penting bila diaplikasikan dalam kegiatan pekerjaan terkhususnya pada pemerintahan desa. Sebagai seorang aparat desa yang diberikan amanah dan tanggungjawab oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dana desa haruslah memiliki karakter yang baik dan moralitas yang tinggi. Kepala desa dan aparat desa lainnya dalam menjalankan aktivitas dan tugas yang diberikan sudah menanamkan dalam dirinya falsafah *sulapa eppa* yaitu sebuah kearifan lokal yang mengandung nilai kejujuran, keberanian, kecerdasan, dan ketegasan dalam mengelola dana desa, karena dana yang

dikelola bukanlah jumlah yang sedikit dan akan berdampak fatal bila terjadi kesalahan didalam pengelolaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai Falsafah *Sulapa Eppa* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Falsafah *Sulapa Eppa* yang memiliki makna dapat dijadikan sebagai pusat kontrol bagi diri masing-masing agar dapat terhindar dari perbuatan yang menyimpang dalam melakukan pengelolaan dana desa. Karena dana desa yang cukup besar jumlahnya bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Makna pada Falsafah *Sulapa Eppa* yang terdiri dari empat sifat yaitu *Macca*, *Malempuq*, *Warani*, dan *Magettang* sudah mereka terapkan dalam mengelola dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

Referensi

- Anto, R. P., dan Amir, M. (2017). Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in Knawe Regency-Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management*.
- Amin, A. 2019. Praktek Akuntansi Dalam Bingkai Etika *Siri'na Pacce*: Persepsi Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 51-57.
- Hanum, F. (2019). Akuntabilitas Keuangan Desa (studi kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*.
- Ibrahim, 2015. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Indriani, C. (2020). Polisi selidiki 7 kasus dugaan penyelewengan BLT Covid-19 di Riau. Retrieved September 21, 2020, from Kompas. Com website:

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/15/21392491/polisi-selidiki-7-kasus-dugaanpenyelewengan-bl-t-covid-19-di-riau>.

Ismail, Muhamad dkk. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Vol,19. No, 2. ISSN : 1979-6471

Jannah, S. 2020. Internalisasi Nilai-Nilai *Macca Na Malempu'* Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan Cv. Iklan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia). *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*.

Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.

Marantika, Sintya. 2017. *Mengungkap Makna Laba Akuntansi Dalam Prespektif Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Ngawi: Sebuah Studi Fenomenologi*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Brawijaya Malang.

Nurmawati. 2018. Kepribadian Konselor Dan Proses Konseling Melalui Pendekatan Kearifan Budaya Lokal Applekelebbireng Pada Masyarakat Bugis Bone. *Journal of Guidance and Counseling*, 2(2), 83-95.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rahmi, S., Mappiare-at, A., dan Muslihati. 2017. Karakter Ideal Konselor Dalam Budaya Teks Pappaseng. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 2(2), 228-237.

Randa, F dan Fransiskus E. D. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. 5(3): 477-484.

Rusdi, M. I.W., dan Susanti P. 2015. Nilai Budaya Siri' Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Jurnal Indigenous*. 13(2): 68-86.

Sahlan, A. 2012. *Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Sarono, A. H. (2020). Hasil Korupsi dana desa hilang dibawa kabur penipu berkedok dukun pengganda uang. Retrieved from Kompas. Com website:<https://regional.kompas.com/read/2020/03/11/16013901/hasil-korupsi-dana-desa-hilang-dibawa-kabur-penipu-berkedok-dukun-pengganda>.

Solata, 2015. Sulapa Eppa' : Falsafah Alam Raya dan Awal Mula Bentuk Aksara Lontara. Diakses online diwebsite: <http://solatasejarahbudaya.blogspot.co.id/2015/12/sulapa-eppa-falsafah-alam-rama-dan-awal>.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, Alfikar, G., Santi, D., dan Yosi, V. 2018. Mempertahankan Eksistensi Budaya Lokal Nusantara ditengah Arus Globalisasi Melalui Pelestarian Tradisi Gawai Dayak Sintang. *Jurnal PEKAN*, 3(1), 43–56.
- Teluk Bone. 2018. Butir-butir dalam falsafah bugis: *Getteng, Lempu, dan Tongeng*. <https://www.telukbone.id/butir-butir-dalam-falsafah-bugis-getteng-lempu-dan-ada-tongeng/> Diakses: 15 Juni 2021.
- Yunus, P. Paita. 2012. Makna Simbol dan Bentuk Seni Hias Pada Rumah Bugis Sulawesi Selatan. *Jurnal Seni dan Budaya Panggung*. 22(3): pp. 225-350.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Wijoyo, *et al.* 2021. *SDM Unggul di Industry 4.0*. Jakarta: Insan Cendekia Mandiri.